

# PANCASILA DALAM KEHIDUPAN EKONOMI

Istiyanti

Guru SMA Muhi Kota Magelang

## Abstract

*Since Pancasila accepted as a principle of living in a society, nation and state, then the Ideological life of the nation has been steady and serene, an atmosphere of life that is very helpful to create excitement to the life of the nation in its various aspects.*

*In the meantime conceptual thoughts about Pancasila economy began to grow in the New Order era to the present discussion Reform Order Pancasila economy more widely discussed by experts and practitioners. Even the recent House of Representatives discusses more intense, particularly in relation to the elaboration of the understanding of economic democracy.*

*Through this paper, the authors will discuss the extent to which the ideology of Pancasila has actually penetrated into the heart of economic beings citizen of Indonesia. In other words, we want to see how far the concept of Pancasila economy increasingly accepted and implemented them in real economic life of everyday society, both economic actors directly and government and all members of society.*

**Keywords:** *Economic Pancasila*

## A. IDEOLOGI PANCASILA

Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja (perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Pancasila yang merupakan jiwa dan pandangan hidup bangsa telah dianggap mampu membawa seluruh bangsa Indonesia menuju ke arah kehidupan yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, meskipun belum sepenuhnya mencapai tahap masyarakat yang adil dan makmur, yang *tata tentrem karta raharja*.

Apabila dalam teori ekonomi Barat (*Klasik – Neoklasik – Keynesian*) diasumsikan bahwa hakekat manusia adalah *egois* dan *selfish*, sedangkan dalam teori ekonomi “Timur” (*Marxian*) manusia dianggap bersemangat *kolektif*, maka dalam masyarakat Pancasila manusia mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai warga masyarakat, antara kehidupan materi dan kehidupan rokhani. Manusia Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa, selain *homo – economicus*, sekaligus *homo – metafisikus* dan *homo – mysticus* (Mubyarto, 1991).

Hal ini berarti bahwa dalam ekonomi Pancasila manusia tidak hanya dilihat dari tata segi saja yaitu insting ekonominya, tetapi sebagai manusia bulat, manusia seutuhnya. Sebagai manusia yang utuh ia berfikir, bertindak laku dan berbuat, tidak berdasar rangsangan ekonomi saja, tetapi juga terangsang

oleh faktor-faktor *sosial* dan *moral*. Faktor sosial dalam hubungannya dengan manusia lain dan masyarakat di mana ia berada, dan faktor moral dalam hubungan manusia sebagai titah Allah dengan penciptanya.

Memang setiap masyarakat mempunyai atau menganut sistem nilai tertentu, yaitu sistem preferensi yang dianggap disepakati oleh seluruh anggota masyarakat. Tanpa sistem nilai tertentu tidak akan ada kebudayaan dan sistem peradaban tertentu. Bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaan dan dapat bertahan sebagai satu bangsa adalah karena memiliki sistem nilai. Sistem nilai atau falsafah dasar bangsa Indonesia yang sekarang sudah menjadi ideologi bangsa adalah Pancasila. Karena Pancasila sudah disepakati menjadi falsafah dasar yang menjadi pandangan dan pegangan hidup bangsa, maka ia menjadi *moral* kehidupan bangsa, menjadi ideologi yang menjiwai perikehidupan bangsa di bidang-bidang sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik dan pertahanan keamanan.

Kalau moralitas teori ekonomi Adam Smith adalah kebebasan (*liberalisme*), dan moralitas teori ekonomi Marx adalah diktator mayoritas kaum “proletar”, maka moralitas ekonomi Pancasila mencakup seluruh asas Pancasila yaitu *Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial*.

## B. PENERAPAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM EKONOMI

Pancasila dasar negara dapat “diterapkan” dalam kehidupan ekonomi bangsa, negara, dan masyarakat sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral;
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan *kemerataan sosial (egalitarian)*, sesuai asas-asas kemanusiaan;
3. Persatuan Indonesia. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

Dari sudut lima “aturan main” yang diturunkan dari setiap sila dalam Pancasila kita bisa melihat sejauh mana aturan main tersebut telah bisa ditegakkan dalam masyarakat. Misalnya dalam sila Persatuan Indonesia kita bisa meneliti setiap kasus kebijaksanaan ekonomi yang hendak diambil, apakah akan menyumbang atau tidak pada peningkatan *ketangguhan* atau *ketahanan* ekonomi nasional. Lebih spesifik *Ketangguhan* atau ketahanan ekonomi nasional. Lebih spesifik lagi bisa diambil contoh apakah setiap *butang baru* atau “*kerja sama*” ekonomi dengan negara lain bisa “menyumbang” atau sebaliknya “mengancam” ketangguhan dan ketahanan ekonomi nasional.

Sebagai contoh paling sering menjadi bahan perdebatan hangat adalah pengambilan kebijaksanaan yang menyangkut untung rugi (*trade off*) antara *pertumbuhan* dan *pemerataan*, yang amat erat berkaitan dengan sila ke dua, sila ketiga, dan sila ke lima. Apabila sila ke dua “memerintahkan” peningkatan *pemerataan sosial* secara terus menerus tanpa mengorbankan pertumbuhan, maka para pengambil kebijaksanaan perlu mempertimbangkan berbagai alternatif kebijaksanaan untuk memberikan

bobot lebih besar pada kebijaksanaan pemerataan tersebut.

Kemudian bagaimana dengan “keseimbangan” bisa ditentukan dalam praktek pelaksanaan. Misalnya dewasa ini sudah semakin banyak ditemukan data yang menunjukkan keberhasilan program-program pemerataan khususnya di Pulau Jawa meskipun rupanya belum terjadi di luar Pulau Jawa. Dalam pada itu timbul “masalah baru” berupa semakin senjangnya “kemakmuran” antara Jawa dan Luian Barat dan Indonesia Bagian Timur. Pulau-pulau luar Jawa khususnya Sumatera yang dulu lebih “makmur” dibandingkan Jawa, sekarang semakin “dilampai” oleh Jawa.

Data *Susenas* dari BPS misalnya menunjukkan bahwa pada tahun 1970 “pendapatan” penduduk Jawa 35 % di bawah “pendapatan” rata-rata penduduk luar Jawa. Tetapi perbandingan ini 30 tahun kemudian berbalik, yaitu kini justru “pendapatan” penduduk luar Jawa 20 % di bawah rata-rata pendapatan penduduk luar Jawa. Maka kita lihat bahwa pembangunan yang berpedoman pada satu perencanaan sentral ternyata belum mampu mewujudkan *keadilan sosial* bagi penduduk seluruh wilayah Indonesia.

Demikian dengan data empirik ini bisa kita lihat bahwa “aturan main” ekonomi Pancasila dengan 5 silanya tidak saja menghadapi tantangan dalam “disiplin” penerapannya, tetapi sifat tantangannya itu sendiri bisa berubah dari waktu ke waktu, di mana diperlukan kewaspadaan terus-menerus dalam menjaga ketepatan pelaksanaannya.

Mengapa masalah-masalah tersebut muncul nampaknya disebabkan antara lain; (1) masih adanya peninggalan sistem budaya feodal; (2) kemajemukan bangsa dan (3) geografi Indonesia yang menyebar amat luas dari Sabang sampai Merauke.

## C. PANCASILA, ETIKA EKONOMI, DAN DUNIA BISNIS.

Dalam melaksanakan sistem ekonomi usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, kita mengenal tiga pelaku utamanya yaitu *koperasi*, *usaha negara* dan *usaha swasta*. Dari segi pandangan *disiplin nasional* yang harus atau wajib di patuhi, kita harus menyatakan bahwa masing-masing pelaku ekonomi tersebut mempunyai *etika kerja* sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain.

Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang *bervatak sosial* merupakan organisasi atau *perkumpulan orang* (bukan perkumpulan modal) yang dibentuk

oleh para anggotanya untuk *melayani* kepentingan mereka, yaitu membantu memperjuangkan kepentingan mereka, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Ini berarti *misi* dan *etika kerja* (perkumpulan) koperasi adalah *pelayanan* sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin kepada anggota. Maka ukuran paling mendasar untuk menilai berhasil tidaknya koperasi adalah *manfaat pelayanan* kepada anggotanya.

Ditinjau dari segi ini maka keuntungan atau sisa hasil usaha (SHU) adalah sekunder, yang kalau ada memang akan sangat menyenangkan semua anggota. Namun seandainya SHU tidak ada pada akhir tahun buku, tetapi selama tahun yang bersangkutan setiap anggota koperasi sudah merasa kepentingannya *dilayani* dan *diperjuangkan* oleh perkumpulan koperasi sehingga *kesejahteraan* mereka benar-benar meningkat, maka bisa dikatakan bahwa misi koperasi telah berhasil. Misalnya anggota KUD peternak sapi perah sudah akan menganggap KUD berhasil, apabila KUD bisa secara teratur memasarkan hasil produksi susu para peternak, syukur dengan harga yang selalu bertambah baik, yang mengakibatkan kenaikan *pendapatan* dan *kesejahteraan anggota*.

Etika ekonomi *usaha negara* hampir sama dengan etika ekonomi (perkumpulan) koperasi yaitu *melayani* tetapi sekaligus *melindungi* kepentingan umum. Orientasi pada pelayanan dan perlindungan kepentingan umum inilah misi utama *usaha negara* atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Inilah yang terkandung dalam pengertian “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak”, yang harus dipergunakan untuk meningkatkan *kesejahteraan rakyat* secara maksimal (sebesar-besar kemakmuran rakyat).

Dalam pada itu *usaha swasta* yang memperoleh kesempatan luas dalam perekonomian Indonesia yang menganut *sistem pasar*, berfungsi sebagai wadah *pemupukan modal*. Pemupukan modal hanya bisa dicapai melalui pemupukan keuntungan usaha dari waktu ke waktu (*reinvestasi*). Oleh sebab itu setiap usaha swasta harus *mengejar keuntungan*. Inilah misi atau etika kerja usaha swasta secara sempit. Usaha swasta harus dan wajib memperoleh keuntungan (laba) dari usahanya. Laba itulah *perangsang* usahanya. Etika ekonomi usaha swasta adalah *memproduksi* dan *menyediakan* barang dan jasa kepada masyarakat, dengan *mengambil keuntungan uang* dari kegiatan dan usahanya itu. Usaha swasta berkembang karena ada keuntungan yang bisa diperoleh dan dipupuk.

Atas dasar uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pelaku ekonomi yaitu

koperasi, usaha negara, dan usaha swasta, masing-masing-masing mempunyai *landasan etika* dalam melaksanakan misi tugasnya dalam perekonomian nasional. Secara ringkas bisa dikatakan bahwa *koperasi* merupakan *sektor swadaya* dan merupakan perkumpulan orang untuk meningkatkan *pemerataan*, serta mewujudkan keadilan sosial; *Usaha swasta* merupakan *sektor pemupukan modal* masyarakat untuk meningkatkan *pertumbuhan ekonomi*; sedangkan *usaha negara* merupakan *sektor perlindungan* dan *pelayanan* kebutuhan masyarakat banyak untuk menjaga atau memelihara *stabilitas* ekonomi nasional.

Salah satu kesulitan besar penegakan etika ekonomi adalah menetapkan “dari mana akan dimulai dan oleh siapa” etika ekonomi harus ditegakkan oleh perorangan dan masyarakat, maka kesulitannya biasanya terletak pada situasi dan iklim masyarakat yang tidak membantu dilaksanakannya etika ekonomi tersebut. Iklim masyarakat justru sering merangsang dan menggoda untuk “melanggar” aturan main yang ada.

Menurut pengamatan penulis dalam kenyataan, penegakan etika bangsa di bidang *ekonomi* dan *bisnis* tidak terlalu mudah. Kecenderungan orang dan masyarakat *bisnis* untuk “*bersaing secara sengit*”, yang berarti menyingkirkan asas kekeluargaan, sering lebih nampak khususnya dengan banyaknya contoh gejala *monopoli*, *oligopoli* dan *konglomerasi* yang menonjolkan keuntungan usaha sendiri dengan mengecualikan usaha orang lain.

#### D. EKONOMI PANCASILA SEBAGAI EKONOMI MORAL

Menurut Mubyarto (1991) bahwa ekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia mempunyai *sistem* dan *moral* tersendiri yang bisa dikenali, dan sifat-sifat sistem serta moral ekonomi Indonesia itu memang telah melandasi atau menjadi pedoman aneka perilaku ekonomi perorangan, kelompok-kelompok dalam masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan negara. Sistem serta moral yang dimaksud bersumber pada *ideologi* bangsa Indonesia yaitu *Pancasila*. Kelima sila dalam Pancasila menggambarkan secara utuh semangat kekeluargaan (gotong royong) dalam upaya mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh dan masyarakat Indonesia.

Bahwa ekonomi Indonesia lebih menonjol sebagai *ekonomi moral*, dan bukan ekonomi yang terlalu *rasional*, sering dibahas para pakar ekonomi dalam kaitan upaya menerangkan fenomena menurunnya efisiensi ekonomi Indonesia khususnya

di sektor Industri. Penurunan efisiensi sektor industri ini sangat jelas bersumber *pada proteksi* yang berlebihan. Sumber kedua dari inefisiensi adalah bentuk pasar yang *monopolistik*. Efisiensi industri yang rendah sebagai akibat proteksi dan berkembangnya praktek-praktek monopoli kemudian menjadi “beban ekonomi” yang berat pada waktu kita harus mulai mengalihkan pasar barang-barang manufaktur dari pasar domestik ke pasar ekspor, yaitu sesudah penerimaan divisa kita jatuh akibat merosotnya nilai ekspor di pasar dunia sebagai akibat era globalisasi, ternyata bangsa Indonesia belum mampu bersaing dengan produk negara lain.

Efisiensi industri yang rendah sebagai akibat proteksi dan berkembangnya praktek-praktek monopoli kemudian menjadi “beban ekonomi” yang berat pada waktu kita harus mulai mengalihkan pasar barang-barang manufaktur dari pasar domestik ke pasar ekspor.

Toleransi bangsa Indonesia terhadap sistem dan cara kerja yang tidak efisien, nampaknya sudah merupakan bagian dari sistem nilai bangsa yang sudah berjalan lama. Ini berarti sama dengan toleransi atas berkembangnya “sistem” *ekonomi biaya tinggi*,

Toleransi kita terhadap *inefisiensi* barangkali didasarkan pada pengalaman bahwa memang bangsa Indonesia mampu bertahan bertahun-tahun, meskipun ekonomi berjalan tidak efisien. Tetapi sebaliknya dirasakan pula bahwa gejala-gejala masyarakat mudah muncul ke permukaan jika masyarakat mulai merasakan ancaman-ancaman terhadap *keadilan*. Maka bisa disimpulkan bahwa dalam ekonomi Pancasila yang menunjang tinggi asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Rupanya apabila harus memilih antara keadilan sosial dan efisiensi, kita akan cenderung mengorbankan efisiensi. Efisiensi sebagai lawan keadilan rupanya analog dengan dilema (*trade off*) antara *pertumbuhan* dan *pemerataan*.

Dua orang peneliti dari Universitas Nasional Australia (ANU) menemukan bahwa transfer pendapatan neto (*nett transfer Income*) dari 10 desil (klas) pendapat keluarga. Dengan menggunakan data Susenas DIY tahun 1991 ditemukan dua kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, keluarga di kota rata-rata menerima *transfer pendapatan* yang jauh lebih besar dibanding rata-rata keluarga di desa (17% di kota dibanding 2,7 % di desa dari pendapatan total pertahun).

*Kedua*, keluarga-keluarga berpendapatan tinggi rata-rata menerima pendapatan transfer *neto positif* lebih besar dibanding rata-rata keluarga berpendapatan rendah (miskin), fenomena ini

nampak tidak berbeda di kota maupun di desa Desa. Semakin kaya seseorang ternyata secara neto ia lebih banyak “menerima” dari pada “memberi”. Sebaliknya semakin miskin seseorang ternyata ia secara neto setiap tahunnya lebih banyak memberi dari pada menerima (Martin dan Dearden, 1991).

Penemuan penelitian lain yang nampaknya sejalan dengan data tersebut antara lain di Propinsi Riau. Nelayan di sana meskipun relatif tinggi dibandingkan pendapatan rata-rata nelayan di Jawa, tapi termasuk salah satu yang terendah dalam masyarakat Riau. Penyebabnya karena adanya berbagai pungutan (baik resmi maupun tidak resmi). Seandainya pungutan-pungutan tersebut hilang, suatu hal yang hampir mustahil, maka pendapatan mereka bisa meningkat menjadi 5 atau 10 kali lebih besar (Mubyarto, 1991)

Sebenarnya fenomena ini bukanlah fenomena baru dalam perekonomian pedesaan kita. Kurang berkembangnya ekonomi komoditi perkebunan rakyat seperti karet, kelapa sawit, cengkeh, kopi antara lain disebabkan terlalu banyaknya “pungutan” atas penerimaan petani, sehingga untuk karet misalnya petani hanya menerima paling banyak 40 % dari harga *job* (Mubyarto, 1991) Harga yang rendah dan tidak adanya perangsang untuk meningkatkan mutu hasil produksi petani, tidak memberikan gairah bagi upaya peningkatan produksi. Maka dalam hal karet rakyat misalnya sistem PIR BUN yang dikenalkan pemerintah sejak tahun 1977 ditujukan antara lain untuk meningkatkan penerimaan petani karet menjadi paling sedikit 70 % dari harga *job*.

Demikian kiranya jelas bahwa *ekonomi moral* yang tidak semata-mata *rasional* harus kita akui sudah melekat pada sistem nilai dan budaya bangsa Indonesia. Meskipun kita secara terbuka ingin mengikis habis sifat-sifat irrasional yang tercermin dalam efisiensi dan produktivitas yang rendah dalam perekonomian Indonesia, toh pada akhirnya kita menghadapi “tantangan” berpa moral ekonomi bangsa yang tidak sepenuhnya bersifat negatif. Secara jujur dalam hati nurani kita sebagai bangsa masih selalu terselip perasaan was-was jangan-jangan pengambilan pilihan yang semata-mata rasional justru akan merugikan dalam jangka panjang dan justru akhirnya akan kita sesali.

## E. PENUTUP

Wawasan ekonomi Pancasila memberikan semacam pegangan kepada setiap pelaku ekonomi dalam melaksanakan misi dan tugasnya masing-masing, dalam upaya memajukan kehidupan

ekonominya masing-masing, dan dalam upaya memajukan kehidupan ekonomi negara, bangsa dan masyarakat.

Ideologi ekonomi Pancasila adalah “aturan main” yang mengikat setiap pelaku ekonomi, yang apabila dipatuhi secara penuh akan mengakibatkan tertib dan teraturnya perilaku setiap warga negara. Ketertiban serta keteraturan perilaku ini pada gilirannya akan menyumbang pada kematapan dan efektifitas usaha perwujudan *keadilan sosial*.

Etika Ekonomi Pancasila bersumber pada UUD 1945 khususnya pasal 33 sebagai *sistem ekonomi kekeluargaan*, dan pada Pancasila sebagai *pedoman etik* yang memberikan semangat dan gerak pembangunan nasional.

Apabila wawasan ekonomi Pancasila sudah kita terima sebagai satu-satunya pegangan etik sistem dan kebijaksanaan pembangunan nasional, maka ia berubah menjadi acuan nasional yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Gratifikasi (hadiah) dan sanksi atas pelaksanaan atau pelanggaran aturan etik memang bersifat etik pula, yang pengawasannya tidaklah bisa dilakukan oleh aparat negara dan

pemerintah saja. Pengawasan ini harus *melekat* pada hakekat moral masyarakat bangsa secara keseluruhan baik dalam kelompok-kelompok kecil maupun kelompok besar.

Tujuan akhir pembangunan nasional sesungguhnya sangat mulia, di mana tujuan tersebut adalah sebagaimana tersirat pada sila ke lima yaitu *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Secara lebih lengkap pembangunan nasional harus mampu (1) memajukan kesejahteraan umum; (2) memajukan kecerdasan kehidupan bangsa, dan; (3) mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Untuk mewujudkan tersebut, maka sudah seharusnya misi pembangunan ekonomi tidak hanya dibatasi pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi mencakup sekaligus pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*). Inilah pembangunan ekonomi yang menekankan pada pembangunan manusianya, yang hanya bisa terlaksana apabila ada *partisipasi* secara total dari seluruh rakyat. Hanya dengan pembangunan ekonomi yang demikian, akan terwujud suatu *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Martin Ravallion and Dearden L. 1991. *The Distributional Outcomes of A “Moral Economy”*, Working paper.
- Mubyarto. 1991. *Ideologi Pancasila dan Ekonomi*. BP7 Pusat, Jakarta.
- Mubyarto dan Boediono. 1991. *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta, BPFE UGM.